

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Albert, Gary L. *et.al*, 2001, *Handbook of Disability Studies*, Sage Publication, California.

Ali, Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Depok.

Asplund, Knut, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*,. PUSHAM UII, Yogyakarta.

Asshidiqie, Jimly, 2009, *The Constitutional Law of Indonesia A Comprehensive Overview*, Sweet & Maxwell, Malaysia.

_____ dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Setjen MK RI, Jakarta.

Bahar, Syaфроedin, 1995, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Sekretariat Negara, Jakarta.

_____, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Byrnes, Andrew, *et.al*, 2007, *From Exclusion to Equality: Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Its Optional Protocol*, United Nations, Geneva.

Dahl, Robert, 2001, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat Edisi Terjemahan oleh Rahman Zainudin*, Yayasan Obor, Jakarta..

Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Rajawali Pers.

Fina, Valentina Della *et.al.*, 2018, *The United Nations convention on the rights of persons with disabilities: A commentary*, Springer, Switzerland,

Isra, Saldi dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Kasim, Ifdhal, 2001, *Hak sipil dan Politik*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016, *Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Komnas HAM, Jakarta.

Liddle, William, 1992, *Pemilu-Pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES, Jakarta.

M. Gaffar, Janedjri 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.

Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku VIII Warga Negara, Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta.

Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Nowak, Manfred 2003, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.

Nursyamsi Fajri, et.al, 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, PSHK, Jakarta.

PPUA Penca, 2011, *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*, PPUA Penca, Jakarta.

Ramdani, Fadli, et.al, 2019, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Perludem, Jakarta

Riggat, T, & D. Maki (eds.), *Handbook of rehabilitation counseling*, Springer, New York.

Riyadi, Eko, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok.

Smith, Rhona K.M, 2005, *Textbook on International Human Rights 2nd Edition*, Oxford University Press, New York.

Soemantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soemitro, Ronny Haniatjo 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

_____ dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

Soeprapto, Maria Farida Indrati 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, 2011, *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif, Kemitraan*, Jakarta.

Tim Penyusun, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku V Pemilihan Umum)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

JURNAL

Anggono, Bayu Dwi “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanggulangan Bencana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 2, Nomor 22, Tahun 2010,

Arinanto, Satya, “Demokratisasi Kehidupan Politik Di Indonesia Menyongsong Pemilu 1992 Dan Sidang Umum MPR 1993”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Oktober, 1991.

Harpur, Paul “Embracing the New Disability Rights Paradigm: The Importance of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities” *Asia-Pacific Journal of Human Rights*, Vol 18, 2017.

Irfani, Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3 Tahun 2020

Marzuki, Laica, “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, 2011.

Sihbudi, Riza, “Evaluasi Terhadap Undang-Undang Pemilu Dan Peraturan Pelaksanaannya Ke Arah Penyempurnaan Sistem Pemilu” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Februari, 1990.

Wardana, Agung dan Ni Putu Yogi Paramitha Dewi, “Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia”, *Asia-Pacific Journal of Human Rights*, Vol 18, 2017.

Wicaksono, Dian Agung, “Implikasi Re-eksistensi Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 1 Tahun 2013.

HASIL PENELITIAN

Khairul Fahmi, 2019 , *Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Berintegritas*, Disertasi, Program Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018, *Dimensi Asas Pemilihan Umum dan Integritas Hakim Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Sengketa Hasil Pemilu*, Hasil Penelitian, Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

ARTIKEL DALAM ANTOLOGI

Altman, Barbara, ‘Disability Definitions, Models, Classification Schemes, and Applications’, dalam Gary L. Albert, et.al, 2001, *Handbook of Disability Studies*, Sage Publication, California.

Degener, Theresia ‘A new human rights model of disability’, dalam Valentina Della Fina, et.al., *The United Nations convention on the rights of persons with disabilities: A commentary*, Springer, Switzerland.

_____ dan Andrew Begg, 2017, ‘From Invisible Citizens to Agents of Change: A Short History of the Struggle for the Recognition of the Rights of Persons with Disabilities at the United Nations’, dalam Valentina Della Fina,

et.al., The United Nations convention on the rights of persons with disabilities: A commentary, Springer, Switzerland.

Smart, J, ‘Models of disability: The juxtaposition of biology and social construction’, dalam T. Riggar & D. Maki (eds.), *Handbook of rehabilitation counseling*, Springer, New York.

MAKALAH / PIDATO

Boer, Alexander, Tom van Engers, dan Radboud Winkels, “Mixing Legal and Non-Legal Norms”, Paper disampaikan dalam konferensi Legal Knowledge and Information Systems: JURIX (the Dutch Foundation for Legal Knowledge Based Systems) : the Eighteenth Annual Conference pada tahun 2005.

Degener, Theresia “International Disability law: A New Legal Subject on The Rise”, Paper disampaikan pada *Experts Meeting* di Hongkong, 13-17 Desember 1999.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Yang Telah Dicitak Ulang).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social And Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Right of Person with Disabilities* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 24 Februari 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3 PUU/V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 23 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 23 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, tanggal 13 Oktober 2016.

ARTIKEL INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/tuna--2>, diakses pada 21 November 2020.

Pijar Anugerah, Menilik bahasa yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan disabilitas, BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46325838>, diakses pada 21 November 2020.

DOKUMEN LAIN

International Bill of Human Rights.

International Labour Organization Convention Nomor 159 Tentang Vocational Rehabilitation and Employment of Disabled Person.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945.

Resolusi Nomor A/RES/37/52 Tahun 1982 tentang *World Programme of Action Concerning Disabled Persons.*

Resolusi Nomor A/RES/37/53 Tahun 1982 tentang *Implementation of the World Programme of Action Concerning Disabled Persons.*

The Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons Tahun 1971.

The Declaration on the Rights of Disabled Person Tahun 1975.

The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial

Discrimination Tahun 1965.

The International Convention on the Economic, Social and Cultural Rights

(Ecosoc) Tahun 1966.

Universal Declaration of Human Rights.

United Nation Yearbook 1970.